



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor SE- 48 /PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.1.KU.03.03-93 tanggal 26 Juni 2018 hal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) HKI Tahap II, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 621/KMK.02/2014 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 970/KMK.02/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-2/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Ditjen Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2018.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahap II Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp71.818.628.902 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah).
2. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2018 pada angka 1 diatas terdiri atas :
 - a. Rp44.404.245.097 (empat puluh empat miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya (TA 2017). Sisa maksimum pencairan dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud telah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBP tahun anggaran berjalan.
 - b. Rp27.414.383.805 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan April 2018.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahap II Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018
Plh.DIREKTUR JENDERAL,

ASKOLANI
NIP 196606111992021001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan *WJ*

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

1. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
7. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG
11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI
12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG
13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK
15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA
16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN
17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA
18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO
19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU
20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II
21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI
22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON
23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR
24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM
25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG
26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA
27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU
28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE
29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG
30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG
31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI
33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU

Lampiran :

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE48/PB/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan /
Dana DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Ditjen Kekayaan
Intelektual Tahap II Tahun Anggaran 2018

**DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAIRAN (MP) PNBP TAHAP II T.A. 2018
PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP Tahap I	MP Tahap II	MP Sampai Dengan Tahap II
1	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	139	JAKARTA V	153.522.451.000	1.257.880.000	152.264.571.000	24.404.245.097	27.414.383.805	51.818.628.902
2	408724	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	139	JAKARTA V	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
3	408733	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	022	BANDUNG I	694.006.000	0	694.006.000	694.006.000	0	694.006.000
4	408746	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	820.189.000	0	820.189.000	820.189.000	0	820.189.000
5	409184	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	030	YOGYAKARTA	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
6	408756	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	135	SURABAYA II	820.189.000	0	820.189.000	820.189.000	0	820.189.000
7	408786	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	001	BANDA ACEH	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
8	408765	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	004	M E D A N I	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
9	408795	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	010	P A D A N G	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
10	408806	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	008	PEKANBARU	694.006.000	0	694.006.000	694.006.000	0	694.006.000
11	409163	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	012	J A M B I	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
12	408815	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	014	PALEMBANG	694.006.000	0	694.006.000	694.006.000	0	694.006.000
13	408826	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	017	BANDAR LAMPUNG	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
14	408836	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	042	PONTIANAK	694.006.000	0	694.006.000	694.006.000	0	694.006.000
15	409194	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	043	PALANGKARAYA	567.823.000	0	567.823.000	567.823.000	0	567.823.000
16	408845	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	045	BANJARMASIN	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
17	408856	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	046	SAMARINDA	757.098.000	0	757.098.000	757.098.000	0	757.098.000
18	408866	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	049	M A N A D O	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
19	409214	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	051	P A L U	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
20	408776	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	136	MAKASSAR II	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
21	409204	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	060	K E N D A R I	504.732.000	0	504.732.000	504.732.000	0	504.732.000
22	408896	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	061	A M B O N	504.732.000	0	504.732.000	504.732.000	0	504.732.000
23	408876	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	037	D E N P A S A R	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
24	409223	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	038	M A T A R A M	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
25	408885	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	039	K U P A N G	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
26	408905	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	063	J A Y A P U R A	441.640.000	0	441.640.000	441.640.000	0	441.640.000
27	409173	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Bengkulu	016	B E N G K U L U	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
28	649026	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	062	T E R N A T E	504.732.000	0	504.732.000	504.732.000	0	504.732.000
29	648993	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	020	S E R A N G	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
30	649005	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	015	P A N G K A L P I N A N G	378.549.000	0	378.549.000	378.549.000	0	378.549.000

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP Tahap I	MP Tahap II	MP Sampai Dengan Tahap II
31	649014	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	050	GORONTALO	630.915.000	0	630.915.000	630.915.000	0	630.915.000
32	667785	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	378.549.000	0	378.549.000	378.549.000	0	378.549.000
33	667776	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	567.823.000	0	567.823.000	567.823.000	0	567.823.000
34	667796	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	252.365.000	0	252.365.000	252.365.000	0	252.365.000
TOTAL					173.522.451.000	1.257.880.000	172.264.571.000	44.404.245.097	27.414.383.805	71.818.628.902

Plh. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



ASKOLANI
NIP. 196606111992021001